

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

**PENGUMUMAN *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN
PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI
KEPEMILIKAN PERUSAHAAN MANAJER INVESTASI SYARIAH
Nomor: B. 02007/BPKH/BP/A7.4/07/2021**

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

- Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Kepemilikan Perusahaan Manajer Investasi Syariah.
- Ruang Lingkup Pekerjaan : Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk melakukan hal – hal, sebagai berikut:
- a. Menyusun Kajian Kepemilikan Perusahaan Manajer Investasi Syariah yang memuat diantaranya:
 - a) Prospek Industri Manajer Investasi Syariah.
 - b) Keuntungan kompetitif investasi pada Bisnis Manajer Investasi serta relevansinya dengan BPKH.
 - c) Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan Manajer Investasi Syariah.
 - d) Rekomendasi skema investasi pada Manajer Investasi melalui pembentukan baru / akuisisi yang sudah ada (*cost and benefit analysis*).
 - e) Rekomendasi skema investasi melalui pembentukan baru
 - Proses
 - *Timeline*
 - f) Rekomendasi skema investasi melalui Akuisisi meliputi antara lain:
 - Rekomendasi Masing-masing 5 terbaik dari Manajer Investasi berdasarkan penilaian *scoring* (bisnis, evaluasi kinerja).
 - Jenis surat berharga (saham/*convertible bond*).
 - Waktu pelaksanaan (sebelum/sesudah IPO).
 - Evaluasi Kinerja.
 - Rencana-rencana skema strategis lainnya yang relevan sesuai dengan UU dan ketentuan yang berlaku dalam mengoptimalkan *return* dan meminimalisir risiko investasi
 - b. Melakukan paparan kepada BPKH terhadap hasil Kajian Kepemilikan Perusahaan Manajer Investasi Syariah.

- Kebutuhan Tenaga Ahli/Personil : Penyedia terpilih wajib menyediakan 3 (orang) orang Tenaga Ahli/Personil, dengan rincian:
- a. Tenaga Ahli Bidang Pasar Modal Syariah, dengan kualifikasi:
 - a) Pendidikan minimal strata satu (S-1);
 - b) Berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun dalam bidang jasa konsultansi dan pembuatan *feasibility study* bisnis/investasi.
 - b. Tenaga Ahli Bidang Manajer Investasi, dengan kualifikasi:
 - a) Pendidikan minimal strata satu (S-1);
 - b) Berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun dalam bidang jasa konsultansi dan pembuatan *feasibility study* bisnis/investasi.
 - c. Asisten Ahli Bidang Keuangan, dengan kualifikasi:
 - c) Pendidikan minimal strata satu (S-1);
 - d) Berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam bidang jasa konsultansi dan pembuatan *feasibility study* bisnis/investasi.
- Syarat Izin Usaha dan Syarat Teknis Lainnya :
- Memiliki izin usaha dengan Kategori/Kode KBLI 7020 (Aktivitas Konsultasi Manajemen).
 - Memiliki pengalaman dalam pembuatan Kajian pada lembaga keuangan dibuktikan dengan SPK / PKS.
- Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 60 (enam puluh) hari kalender
- Keluaran (*Output*) : 1 (satu) Paket Pekerjaan dengan Keluaran (*Output*), berupa: 1 (satu) set dokumen Kajian Kepemilikan Perusahaan Manajer Investasi Syariah
- Perkiraan Maksimal Biaya : Rp90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, **diwajibkan** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan **mengirimkan *screen shot* halaman isian data Pelaku Usaha yang bersangkutan di portal pengadaan.com** kepada Divisi Pengadaan dan Umum BPKH melalui *email* divisi.pengadaan@bpkh.go.id paling lambat pada hari **Kamis, 08 Juli 2021 Pukul 23.59 WIB** dengan *Subject: Pendaftaran Rencana Pengadaan Konsultan Kajian Kepemilikan Manajer Investasi*, serta dilanjutkan dengan login di <https://eproc.bpkh.go.id/>.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menyampaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan. Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa.

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

| No | TAHAPAN | JADWAL | | |
|----|---|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | Hari/Tanggal | Waktu | |
| | | | Mulai | Akhir* |
| 1. | Pendaftaran Pelaku Usaha | Senin – Kamis, 05 – 08 Juli 2021 | Senin, 12.00 WIB | Kamis, 23.59 WIB |
| 2. | Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com | | | |
| 3. | Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan | | | |
| 4. | Pengumuman RFQ/RFI (<i>Vendor Survey</i>) | Senin – Jum'at, 05 – 09 Juli 2021 | Senin, 17.00 WIB | Jum'at, 12.00 WIB |
| 5. | Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha | | | |
| 6. | Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih | Senin – Rabu, 12 – 14 Juli 2021 | Senin, 08.00 WIB | Rabu, 23.59 WIB |
| 7. | Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga | Kamis – Senin, 15 – 19 Juli 2021 | Kamis, 08.00 WIB | Senin, 23.59 WIB |
| 8. | Penandatanganan SPK | Selasa, 20 Juli 2021 | 08.00 WIB | 17.00 WIB |

Keterangan:

*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 02 Juli 2021

TTD

Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 02007/BPKH/BP/A7.4/07/2021

Tanggal : 02 Juli 2021

PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

| No. | Slot | Dokumen | Perorangan | Non Perorangan | | | | | Foreign Company |
|---|---------------------------------|--|------------|--------------------|----------|----------|---------|--------------------|-----------------|
| | | | | PT / CV / Koperasi | KAP/KIPP | Law Firm | Notaris | Lembaga Pendidikan | |
| DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB | | | | | | | | | |
| 1 | Akte Pendirian | - Akte Pendirian | | V | V | V | | | |
| | | - Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan | | | | | V | | |
| | | - Surat Keputusan Dewan Fakultas Chamber of Commerce Business Register | | | | | | V | V |
| | Akte Perubahan | Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi) | | V | V | | | | |
| | SK Kemenkumham (Akte Pendirian) | Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian) | | V | V | V | | | |
| | SK Kemenkumham (Akte Perubahan) | Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan) | | V | V | | | | |
| 2 | Domisili | - Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh OSS) | | V | V | V | | | |
| | | - Profile Notaris | | | | | V | | |
| | | - Keputusan Dewan Fakultas Chamber of Commerce Business Register | | | | | | V | V |
| 3 | NPWP Perusahaan | Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan | | V | V | V | V | V | |
| 4 | SPT | Setoran Pajak Tahunan | | V | V | V | V | V | |
| 5 | SIUP | - Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB) | | V | | | | | |
| | | - Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP | | | | V | | | |
| | | - Kartu ID PERADI | | | | V | | | |
| | | - Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan | | | | | V | | |
| | | - Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD) | | | | | | V | |
| | | - Chamber of Commerce Business Register – CCI Number | | | | | | V | |
| 6 | TDP | - Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha | | V | V | | | | |
| | | - Kartu ID PERADI | | | | V | | | |
| | | - Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN | | | | | V | | |
| | | - Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD) | | | | | | V | |
| | | - Chamber of Commerce Business Register – CCI Number | | | | | | V | |

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

| No. | Slot | Dokumen | Perorangan | Non Perorangan | | | | | Foreign Company |
|--|--|---|------------|--------------------|---------|----------|---------|--------------------|-----------------|
| | | | | PT / CV / Koperasi | KAP/KPP | Law Firm | Notaris | Lembaga Pendidikan | |
| 7 | Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba | - Laporan Neraca 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi) | | V | V | V | V | V | V |
| | | - Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi) | | V | V | V | V | V | V |
| DOKUMEN PERSONAL - WAJIB | | | | | | | | | |
| 8 | KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi | - Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris | | V | V | V | | | V |
| | | - Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi | V | V | V | V | V | V | V |
| 9 | NPWP Komisaris & Direksi | Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi | V | V | V | V | V | V | |
| 10 | Ijazah Terakhir Tenaga Ahli | Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama | V | V | V | V | V | V | V |
| DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB | | | | | | | | | |
| 11 | Surat Pernyataan Vendor | Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com) | V | V | V | V | V | V | V |
| 12 | Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir) | Surat Perjanjian Kerjasama / PO | V | V | V | | | V | V |
| 13 | Struktur Organisasi | Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart | | V | V | V | V | V | V |
| DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB | | | | | | | | | |
| 14 | Izin Lain-lain | Perizinan seperti IUIK | | V | V | V | | | |
| 15 | Surat Keagenan | Perizinan Keagenan atau NIB | | V | | | | | |
| 16 | Angka Pengenal Impor | Angka Pengenal Impor atau NIB | | V | | | | | |
| 17 | Sertifikasi Perusahaan | - Sertifikasi Perusahaan | | V | | V | V | | V |
| | | - Surat Tanda Terdaftar KAP OJK | | V | V | | | | |
| 18 | Sertifikasi Tenaga Ahli | Sertifikasi Tenaga Ahli | V | V | V | V | V | V | V |
| 19 | NIB | Nomor Induk Berusaha | | V | V | | | | |
| 20 | PKP | Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak | | V | V | V | | V | |

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.